



LAPORAN KINERJA

SEKERTARIAT DIREKTORAT JENDRAL KELAUTAN

2026 | TRIWULAN 2



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Miftahul Huda

Penyusun:

R. Tomi Supratomo

Luh Putu Ayu Damayanti

Chairiyanti

Punto Apri Sembodo

Elvanri Anggi Widianti

Kontributor:

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan

KATA PENGANTAR

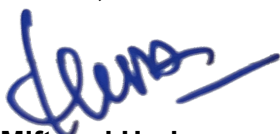
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK) Triwulan II Tahun 2026. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Setditjen PK dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah – langkah strategis Setditjen PK pada Triwulan II Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Setditjen PK dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kegiatan kedepan. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PK, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan masa mendatang.

Jakarta, 17 Juli 2026



Miftanul Huda

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK) Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PK dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PK Triwulan II Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PK terdapat 17 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PK. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PK Triwulan II Tahun 2026 sebesar **107,41 (Baik)**.

Pada periode pelaporan Triwulan II Tahun 2026 terdapat 4 indikator kinerja yang memiliki target. Berdasarkan target tersebut 3 indikator kinerja berhasil tercapai dan 1 indikator kinerja yang tidak tercapai. Indikator kinerja yang tidak tercapai tersebut yakni Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PK dimana target indikator tersebut yakni 85 dengan capaian hanya 75,53.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan II	Target Tahunan	Triwulan II Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)	Triwulanan	81	81	91,30	112,71
	2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%)	Tahunan	-	<0,5	-	-
	3.	Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)	Tahunan	-	76	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan II	Target Tahunan	Triwulan II Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
	4.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%)	Tahunan	-	81	-	-
	5.	Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)	Tahunan	-	70	-	-
	6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPK (Nilai)	Semesteran	85	89,5	75,53	88,85
	7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)	Tahunan	-	81,5	-	-
	8.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)	Tahunan	-	3,5	-	-
	9.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)	Tahunan	-	65	-	-
	10.	Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)	Semesteran	77	81	83,19	108,03
	11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)	Tahunan	-	91	-	-
	12.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)	Tahunan	-	77	-	-
	13.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)	Tahunan	-	100	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan II	Target Tahunan	Triwulan II Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
	14 .	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)	Tahunan	-	80	-	-
	15 .	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)	Triwulanan	75	77	99,99	120
	16 .	Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)	Tahunan	-	91	-	-
	17 .	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	Tahunan	-	100	-	-

Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PK Tahun 2026 adalah Rp79.945.803.000. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PK mencapai Rp28.320.159.342 atau 35,42%.

Pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sampai dengan triwulan II Tahun 2026 menghadapi beberapa tantangan diantaranya:

1. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi internal dalam mendukung pembangunan integritas serta keseragaman pemahaman pegawai.
2. Kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum optimal, terutama deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran yang berdampak pada pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), serta belum optimalnya pelaksanaan dana PHLN LAUTRA karena proses revisi carryover yang belum selesai.
3. Keterbatasan sumber daya dan kompleksitas proses penyelesaian output, termasuk efisiensi anggaran dan pengurangan SDM yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN	2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.4 ISU STRATEGIS	3
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 SK 1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.....	11
IK 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)	12
IK 2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%).....	14
IK 3. Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)	16
IK 4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%).....	22
IK 5. Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)	24
IK 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai)	28
IK 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)	30
IK 8. Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)	33
IK 9. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)	35

IK 10. Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)	40
IK 11. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)	46
IK 12. Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)	49
IK 13. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)	51
IK 14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)	57
IK 15. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)	60
IK 16. Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)	62
IK 17. Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	64
3.2 Akuntabilitas Keuangan	69
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Rekomendasi	72
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Capaian Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Laut Triwulan I Tahun 2026	9
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator dan Target Kinerja Setditjen PK Tahun 2026.....	6
Tabel 2.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PK Triwulan II Tahun 2026	9
Tabel 3.	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%) Triwulan II Tahun 2026	13
Tabel 4.	Capaian IK Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%) Triwulan II Tahun 2026	15
Tabel 5.	Capaian IK Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai) Triwulan II Tahun 2026	19
Tabel 6.	Capaian IK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%) Triwulan II Tahun 2026	22
Tabel 7.	Kategori Nilai PM SAKIP	25
Tabel 8.	Capaian IK Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai) Triwulan II Tahun 2026	26
Tabel 9.	Bobot Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	28
Tabel 10.	Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai) Triwulan II Tahun 2026	28
Tabel 11.	Bobot Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)..	31
Tabel 12.	Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai) Triwulan II Tahun 2026	32
Tabel 13.	Kerangka Maturitas SPIP	34
Tabel 14.	Capaian IK Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai) Triwulan II Tahun 2026	34
Tabel 15.	Capaian IK Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%) Triwulan II Tahun 2026.....	38
Tabel 16.	Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks) Triwulan II Tahun 2026	44

Tabel 17. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%) Triwulan II Tahun 2026	47
Tabel 18. Capaian IK Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai) Triwulan II Tahun 2026	49
Tabel 19. Capaian IK Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%) Triwulan II Tahun 2026.....	51
Tabel 20. Capaian IK Pengawasan Kearsipan Internal DJPK Triwulan II Tahun 2026	58
Tabel 21. Capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%) Tahun 2025.....	61
Tabel 22. Nilai dan Predikat atas Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	63
Tabel 23. Capaian IK Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai) Triwulan I Tahun 2026	63
Tabel 24. Capaian IK Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%) Triwulan I Tahun 2026.....	66
Tabel 25. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja	75
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Triwulan II Tahun 2026 disusun sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan, mengukur, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kinerja secara berkala. Dalam implementasinya, penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pedoman teknis dalam penyusunan dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan ini juga memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tata cara evaluasi AKIP secara nasional maupun internal instansi pemerintah. Selain itu, penyusunan dan pengukuran kinerja organisasi turut mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi yang menekankan pengelolaan kinerja organisasi secara holistik pada tingkat kementerian/lembaga hingga unit organisasi.

Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengelolaan kinerja organisasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi pedoman

dalam penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja organisasi. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini memuat capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan selama periode Januari sampai dengan Maret 2026, termasuk analisis terhadap pencapaian indikator kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Melalui penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akuntabel dan terukur mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Triwulan II Tahun 2026.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;

3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
7. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
9. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

1.4 ISU STRATEGIS

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029, Setditjen PK berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan DJPK guna mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB). Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional.

Penguatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi DJPK, melalui:

1. Meningkatkan sinergi perencanaan strategis lintas sektor dan lintas unit organisasi, serta mendorong keterpaduan antara perencanaan program,

- penganggaran, dan pengukuran kinerja organisasi agar selaras dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan nasional;
2. Mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran melalui perbaikan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi pemanfaatan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib dan efisien;
 3. Mendorong pembentukan aparatur yang profesional melalui penguatan implementasi manajemen talenta ASN DJPK sebagai Human Capital dan akselerasi program DJPK, serta memperkuat implementasi reformasi birokrasi dengan fokus pada penyederhanaan proses bisnis, budaya kerja adaptif, dan pelayanan publik yang prima;
 4. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perjanjian nasional, serta produk hukum lainnya melalui proses perumusan yang partisipatif dan berbasis bukti, termasuk penguatan advokasi dan penyediaan informasi hukum yang responsif terhadap dinamika sektor kelautan dan perikanan;
 5. Mengembangkan strategi komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif untuk mendukung citra positif KKP dan DJPK, serta memperluas kerja sama internasional melalui diplomasi kelautan dan perikanan yang proaktif, sejalan dengan kepentingan nasional;
 6. Meningkatkan efisiensi dukungan layanan internal seperti urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, persuratan, dan kearsipan melalui pemanfaatan teknologi digital dan penerapan prinsip tata kelola yang baik;
 7. Mengembangkan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan strategis organisasi, serta mendorong partisipasi penyedia barang/jasa yang kompetitif dan berintegritas;
 8. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern dalam menjaga kualitas pelaksanaan program prioritas nasional dan kinerja KKP melalui pengawasan berbasis manajemen risiko, pengembangan teknologi informasi manajemen pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur pengawasan dan sinergi pengawasan dengan instansi lain;
 9. Mewujudkan pengelolaan data statistik dan informasi yang andal, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung efisiensi layanan publik dan internal; dan;
 10. Menganalisis dan mensinergikan perumusan kebijakan serta mendiseminasikan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan efektivitas pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada tahun 2025-2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, dan penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja Triwulan II Tahun 2026 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di “*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP penjabaran dan penyelarasan antara Sasaran Strategis, indikator Kinerja, dan Target Kinerja Organisasi menggunakan Penjenjangan Kinerja. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Setditjen PK Triwulan II Tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026. Dokumen RKT 2026 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Setditjen PK Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)	81
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%)	<0,5
		3.	Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)	77
		4.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%)	82
		5.	Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)	72
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai)	89,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)	81,75
		8.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)	3,6
		9.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)	66
		10.	Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)	81
		11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)	91
		12.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)	78
		13.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)	100
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)	81
		15.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)	77
		16.	Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)	92
		17.	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	100

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sebagai unit organisasi level dua yang melaksanakan tugas pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan juga mendukung kinerja mandatory lingkup KKP. Kinerja mandatory tahun 2026 antara lain :

1. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI
2. Nilai pembangunan integritas
3. Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis

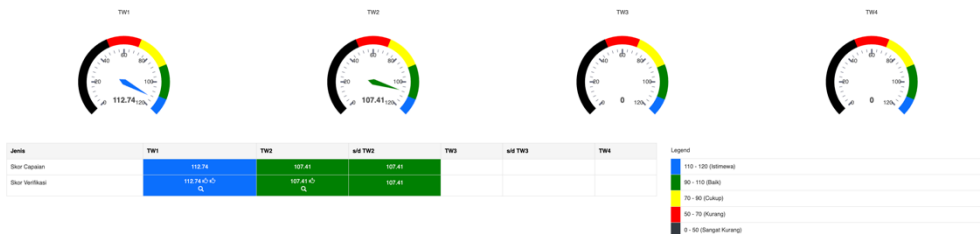
4. Penilaian mandiri SAKIP
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
7. Nilai maturitas struktur dan proses SPIP
8. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP
9. Indeks Profesionalitas ASN
10. Tingkat kepatuhan pengelolaan data
11. Nilai proposal inovasi pelayanan publik
12. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri
13. Nilai pengawasan kearsipan internal
14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP

Untuk mendukung kinerja pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Setditjen PK menetapkan indikator diluar mandatory yang ditetapkan oleh KKP yaitu:

1. Nilai keterbukaan informasi publik DJPK
2. Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PK Triwulan II Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PK terdapat 17 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PK. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PK Triwulan II Tahun 2026 sebesar **107,41 (Baik)**.



Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 1. Nilai Capaian Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Laut Triwulan II Tahun 2026

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Setditjen PK Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PK Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Frekuensi	Target Triwulan II	Target Tahunan	Triwulan II Tahun 2026	
					Capaian	% (Kinerjaku)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)	Triwulanan	81	81	91,30	112,71

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan II	Target Tahunan	Triwulan II Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
dan Ruang Laut	2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%)	Tahunan	-	<0,5	-	-
	3.	Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)	Tahunan	-	76	-	-
	4.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%)	Tahunan	-	81	-	-
	5.	Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)	Tahunan	-	70	-	-
	6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPK (Nilai)	Semesteran	85	89,5	75,53	88,85
	7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)	Tahunan	-	81,5	-	-
	8.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)	Tahunan	-	3,5	-	-
	9.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)	Tahunan	-	65	-	-
	10.	Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)	Semesteran	77	81	83,19	108,03
	11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)	Tahunan	-	91	-	-
	12.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)	Tahunan	-	77	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan II	Target Tahunan	Triwulan II Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
	13 .	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)	Tahunan	-	100	-	-
	14 .	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)	Tahunan	-	80	-	-
	15 .	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)	Triwulanan	75	77	99,99	120
	16 .	Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)	Tahunan	-	91	-	-
	17 .	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	Tahunan	-	100	-	-

3.1 SK 1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PK, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%), 2) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%), 3) Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai), 4) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%), 5) Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai), 6) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPK (Nilai), 7) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai), 8) Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai), 9) Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%), 10) Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks),

11) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%), 12) Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai), 13) Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%), 14) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai), 15) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%), 16) Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai), 17) Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%).

IK 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)

Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) di Ditjen Pengelolaan Kelautan. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Formula perhitungan:

$$X_{\text{rekomendasi}} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- $X_{\text{rekomendasi}}$: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jenderal PK
- A : Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal PK
- B : Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal PK

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%) Triwulan II Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 1		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)						
Capaian Tahun Sebelumnya		Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
85,77	91,30%	5,86	112,71%	81%	112,71%	81%	84%	108,69%

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor 955/ITJ.0/RC.140/VII/2026, capaian IKU persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah di tindaklanjuti (tuntas) pada triwulan II tahun 2026 lingkup Ditjen PK sebesar 91,30% dan berhasil melampaui target yakni sebesar 81%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
 Berdasarkan hasil capaian indikator ini pada tahun triwulan II tahun 2026 (91,30%) lebih besar jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 (85,77%) hal ini disebabkan karena, rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti pada triwulan II tahun 2026 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan II 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan dengan Target Renstra DJPK maka, capaian pada triwulan II tahun 2026 (91,30%) telah berhasil melampaui Target Renstra DJPK 2025 – 2029 (84%).

D. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Solusi

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini didukung oleh seluruh penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi

pengawasan dari Inspektorat dengan melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawabnya.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh penanggung jawab kegiatan pada satker lingkup DJPK untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan.

F. Kegiatan Pendukung

1. Monitoring Penyelesaian Sisa TL Rekomendasi APIP Triwulan I dan Percepatan Penyelesaian TL Rekomendasi APIP Triwulan II dalam Program Pergaraman dan Program Prioritas Lainnya Tahun 2026 pada 20 Mei 2026
2. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Audit Kinerja Pergaraman Nasional dan PDTT PNBPN lingkup DJPK pada 25 Mei 2026
3. Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Audit Kinerja Pergaraman Nasional dan PDTT PNBPN lingkup DJPK pada 26 Mei 2026

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

1. Koordinasi dengan seluruh Penanggung Jawab Kegiatan lingkup DJPK terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Itjen yang ada di aplikasi SIDAK serta melaksanakan rapat pertemuan dengan para penanggung jawab kegiatan yang terkait untuk mempercepat proses tindak lanjut.
2. Memetakan sisa rekomendasi yang belum tuntas
3. Menyusun timeline penyelesaian seluruh rekomendasi
4. Koordinasi dengan penanggungjawab untuk penyelesaian rekomendasi.

IK 2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Konservasi Ekosistem yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada

empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.

Formula perhitungan:

$$X_{\text{penyelesaian}} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- $X_{\text{penyelesaian}}$: Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
A : Jumlah nilai tindak lanjut temuan BPK
B : Jumlah nilai temuan BPK

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IK Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%) Triwulan II Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 2		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK (%)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	2025	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target 2029
								% Capaian
	0,08	-	-	-	-	-	<0,5	<0,5
								-

- Capaian IK Triwulan II Tahun 2026
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian.
- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini tidak memiliki target dan capaian.
- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Solusi

Keberhasilan tercapainya indikator ini didukung oleh komitmen seluruh penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal, dengan melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan. Analisis keberhasilan lainnya juga didukung oleh koordinasi dengan Tim Inspektorat I sebagai Mitra Direktorat Pengelolaan Kelautan terkait dokumen yang harus disiapkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh penanggung jawab kegiatan pada satker lingkup DJPK untuk menunjang capaian pada indikator kinerja ini.

F. Kegiatan Pendukung

1. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Audit Kinerja Pergaraman Nasional dan PDTT PNBK lingkup DJPK pada 25 Mei 2026
2. Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Audit Kinerja Pergaraman Nasional dan PDTT PNBK lingkup DJPK pada 26 Mei 2026.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

1. Menyusun timeline penyelesaian seluruh rekomendasi temuan
2. Berkoordinasi dengan penanggungjawab untuk penyelesaian rekomendasi temuan
3. Rapat pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi BPK

IK 3. Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)

Dalam rangka mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan pembangunan integritas.

Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021. Pembangunan Integritas Organisasi

dilakukan melalui penerapan komponen sistem Integritas dan manajemen risiko KKN.

Penerapan komponen sistem Integritas dilakukan pada tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Pelaksana Teknis meliputi:

1. Keteladanan pimpinan
2. Kode etik dan kode perilaku
3. Peran pengawasan internal
4. Pembangunan sistem antikorupsi
5. Evaluasi internal dan eksternal Integritas;
6. Sistem merit;
7. Akuntabilitas keuangan dan kinerja
8. Pengadaan barang/jasa
9. Standar operasional prosedur
10. Keterbukaan informasi publik
11. Pengelolaan aset.

Pembangunan sistem anti korupsi dilakukan pada tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Pelaksana Teknis meliputi:

1. Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Program pengendalian gratifikasi
3. Sistem pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan/atau laporan harta kekayaan ASN
4. Whistle blower system
5. Sistem pengendalian kecurangan
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Manajemen risiko

6 (enam) aspek tersebut menjadi Indikator Penilaian dalam Lembar Kerja Evaluasi pengukuran capaian IKU Pembangunan Integritas Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bobot penilaian Pembangunan zona Integritas menuju WBK/WBBM mencapai 30% dari total Nilai 100% pada Lembar Kerja Pengukuran Capaian IKU Pembangunan Integritas Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

PENILAIAN		BOBOT
A.	PENGUNGKIT	60,00

PENILAIAN				BOBOT
	I.	PEMENUHAN		30,00
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
	II.	REFORM		30,00
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
TOTAL PENGUNGKIT				
B.	HASIL			40,00
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50
		a.	Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
		b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50
		a.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50

Dalam rangka mendukung capaian **IK 3. Nilai Pembangunan Integritas DJPK** melalui pemenuhan Indikator Penilaian untuk Pembangunan zona Integritas menuju WBK/WBBM, perlu dilakukan kegiatan pendukung untuk memenuhi salah satu Komponen Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yaitu **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**.

Kegiatan pendukung dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, antara lain:

1. Pemenuhan kebijakan pelayanan
2. Penyelenggaraan Budaya Pelayanan Prima
3. Penilaian Kepuasan terhadap layanan

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

- Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5. Capaian IK Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)
Triwulan II Tahun 2026**

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 3		Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	2025	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian Tw I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target 2029
	77	-	-	-	-	-	77	80

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025

Capaian pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 - 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini tidak memiliki target dan capaian.

D. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Solusi

Keberhasilan

1. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi baik dari Tim Penilai Internal maupun Tim Penilai Nasional, dalam hal ini Kementerian PAN RB, sehingga berkontribusi positif terhadap nilai pembangunan integritas.
2. Implementasi penanganan pengaduan yang efektif dan pengendalian gratifikasi yang sudah berjalan dengan baik.
3. Meningkatnya partisipasi pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan konflik kepentingan.

Kendala

Kurangnya penyadartahuan pegawai di Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam mendukung kegiatan pembangunan integritas.

Solusi

Melaksanakan internalisasi kepada anggota Tim Pembangunan Integritas dan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian IK Nilai Pembangunan Integritas DJPK adalah dengan melibatkan seluruh pegawai unit kerja dan mendapatkan dukungan Pimpinan Unit Kerja melalui penyediaan sumber daya yang dibutuhkan serta dilakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam penciptaan inovasi pelayanan publik dengan melibatkan tim Inspektorat Jenderal dan Pusat Data dan Informasi.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IK Nilai Pembangunan Integritas DJPK yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026, antara lain:

1. Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Tim Penanganan Pengaduan DJPK Tahun 2026
2. Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Tim Pengelola Konflik Kepentingan DJPK Tahun 2026
3. Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Tim Penilai Inovasi DJPK Tahun 2026
4. Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Tim Pembangunan Zona Integritas DJPK Tahun 2026
5. Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi DJPK Tahun 2026
6. Pelaksanaan pengisian formulir Daftar Kepentingan Pribadi pegawai di Lingkungan DJPK
7. Pelaksanaan pengisian formulir Profil Potensi Konflik Kepentingan ASN di Lingkungan DJPK.
8. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Kupang.
9. Pendalaman dan asistensi pengisian Lembar Kerja Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

1. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar.
2. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak.
3. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2026.
4. Melaksanakan internalisasi pembangunan integritas pada Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar.

IK 4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; mendukung pencapaian prioritas nasional; merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Formula Perhitungan:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

- PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target.
- IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah.
- AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%) Triwulan II Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan							
IK – 4	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian

94,28%	-	-	-	-	-	82%	85%	-
--------	---	---	---	---	---	-----	-----	---

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2026 tidak terdapat target dan capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025

Capaian pada triwulan II tahun 2026 tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini tidak memiliki target dan capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 tidak bisa dibandingkan karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini tidak memiliki target dan capaian.

D. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Solusi

Keberhasilan dari tercapainya indikator kinerja ini didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja DJPK dalam pelaksanaan kegiatan prioritas, adanya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam implemantasi bantuan pemerintah, serta monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian IK ini adalah dengan melibatkan seluruh pegawai unit kerja yang mendapatkan dukungan Pimpinan Unit Kerja melalui penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan serta dilakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam pelaksanaan program prioritas/strategis.

F. Kegiatan Pendukung

1. Pembahasan Buku Grand Design Pembangunan Garam Nasional Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
2. Pembahasan Realokasi Anggaran PLN LAUTRA
3. Pembahasan Laporan Kegiatan Prioritas DJPK Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan April 2026
4. Rapat Rutin LAUTRA

5. Pembahasan PSN DJPK Tahun 2027
6. Renja Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2027
7. Diskusi Proyek LAUTRA
8. Persiapan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lingkup DJPK Tahun 2026.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Melakukan pemantauan kegiatan prioritas lingkup DJPK yang termasuk kedalam kegiatan LAUT SEBASAH, PROTEKSI, dan PELAUT.

IK 5. Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPK setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerjajaku pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPK adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 7. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Predikat	Nilai	Interpretasi
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IK Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai) Triwulan II Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan							
IK – 5	Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
88,94	-	-	-	-	-	72	76	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan II tahun 2026 tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki target dan capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 tidak bisa dibandingkan karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini tidak memiliki target dan capaian.

D. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Solusi

Keberhasilan tercapainya IKU PM SAKIP ini didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPK dalam

mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPK.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

F. Kegiatan Pendukung

1. Rapat Pembahasan Rencana Kerja Prioritas Bulan Juni 2026 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
2. Penyesuaian Matrik Usulan Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2027 Lingkup DJPK
3. Evaluasi Progres Desain Kampung LAUTRA dan Penganggaran Program
4. Persiapan SAKIP Lingkup DJPK Tahun 2026
5. Pertemuan Koordinasi Progres Blue Carbon
6. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
7. Pembahasan Penggunaan PNPB Tahun 2026 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
8. Pertemuan Koordinasi Progres Ocean Monitoring System (OMS)
9. Pembahasan Laporan Kegiatan Prioritas DJPK Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan Mei 2026
10. Monitoring dan Evaluasi serta Rencana Percepatan Program LAUTRA Tahun 2026 lingkup DJPK
11. Rapat Pembahasan Guideline Negosiasi OMS
12. Diskusi progres Blue Carbon program LAUTRA pada Direktorat P3K
13. Pembahasan Draft Berita Acara PM SAKIP Tahun 2026 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
14. Reviu dokumen usulan revisi penggunaan dana PNPB TA. 2026 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan"

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

1. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPK Triwulan II Tahun 2026
2. Verifikasi Capaian Kinerja DJPK Triwulan II Tahun 2026
3. Penyusunan Laporan Kinerja DJPK Triwulan II Tahun 2025
4. Persiapan data AKIP dan PM SAKIP di lingkup DJPK.

IK 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan:

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_{r_n} \times \text{Bobot Indikator}_{r_n}) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Sedangkan, konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 9. Bobot Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai) Triwulan II Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	
IK – 6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PK (Nilai)	
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026	Renstra DJPK 2025-2029

2025	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
84,18	75,53	-	88,85%	85	84,39%	89,5	-	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 1873/SJ.2/TU.210/VII/2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2026, capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 75,53 yang dimana capaian ini masih belum cukup untuk memenuhi target. Hal ini disebabkan oleh rendahnya aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup DJPK.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan II tahun 2026 sebesar 75,53 jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 84,18 maka, capaian pada triwulan II tahun 2026 masih lebih rendah, hal ini sebabkan oleh rendahnya aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup DJPK.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Pada Renstra DJPK 2025 – 2029 tidak terdapat indikator kinerja ini sehingga tidak bisa dibandingkan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Kendala

1. Penyebab tidak tercapainya target pada indikator kinerja ini disebabkan oleh rendahnya kualitas perencanaan anggaran khususnya pada deviasi halaman III DIPA serta rendahnya kualitas pelaksanaan anggaran khususnya pada aspek penyerapan anggaran yang mempengaruhi penilaian pada IKPA.
2. Adanya proses revisi *carryover* LAUTRA yang belum selesai sehingga pelaksanaan anggaran melalui dana PHLN LAUTRA belum sepenuhnya berjalan

Solusi

1. Melakukan perbaikan atas kualitas dokumen perencanaan anggaran dengan menyesuaikan dokumen halaman III DIPA serta menyusun

strategi penarikan guna memaksimalkan proses realisasi anggaran agar sesuai dengan timeline.

2. Melakukan percepatan pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran LAUTRA.

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melibatkan seluruh unit kerja lingkup Setditjen PK serta terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh ASN serta memanfaatkan sarana dan prasarana baik itu secara online ataupun *hybrid* (online sekaligus offline).

D. Kegiatan Pendukung

Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKPA pada satuan kerja DJPK bulan Mei 2026.

E. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

1. Penyusunan dokumen perencanaan satker lingkup Ditjen PK Tahun 2027.
2. Evaluasi Kegiatan Prioritas lingkup Ditjen PK Triwulan II Tahun 2026.
3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN.
4. Pemantauan Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko (MR) tahun 2026 lingkup Ditjen PK.

IK 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 1 (Eselon I) 81,50

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50

Formula Perhitungan:

NKPA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 11. Bobot Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektifitas

1. Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKPi}{TIKPi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan:

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
 RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
 TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
 n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2. Nilai Efektifitas Satker

$$Nef\ Satker = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RVROi}{TVROi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker
 RVROi : Realisasi Volume RO i
 TVROi : Target Volume RO i

n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE \text{ Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA \text{ UEI} = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEF_{\text{satker}} \times WNEF_{\text{satker}}) + (NE_{\text{satker}} \times WNE_{\text{satker}})$$

Keterangan:

NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
 CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
 NEfsatker : Nilai Efektivitas Satker
 NESatker : Nilai Efisiensi Satker
 WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 WNEfsatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai) Triwulan II Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 7		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
	2025	87,09	-	-	-	-	81,75	82,5

- Capaian IK Triwulan II Tahun 2026
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian.
- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung dengan capaian kinerja anggaran pada unit kerja tingkat pusat. Secara teknis pelaporan, tidak ada kendala yang ditemui pada penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran karena, secara otomatis sudah terintegrasi dengan aplikasi pertanggungjawaban anggaran.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPK dan aplikasi berbasis website.

F. Kegiatan Pendukung

1. Rekonsiliasi Perencanaan Kinerja Lingkup DJPK Tahun 2026
2. Pengukuran dan Verifikasi Kinerja serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I DJPK dan Setditjen PK Tahun 2026
3. Pembahasan Progres *Oceans for Prosperity Project* – LAUTRA
4. Masukan Penyampaian Narasi untuk Laporan Kinerja Level 0 KKP Triwulan I Tahun 2026
5. Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026
6. Penyusunan Laporan Kinerja DJPK Triwulan I Tahun 2026
7. Persiapan PPSU LAUTRA
8. Pembahasan Komponen 2.2 LAUTRA
9. Diskusi Komponen 2 LAUTRA: *Procurement* BIF dan BAF
10. Rapat Koordinasi PHLN Lautra
11. Pembahasan Tindak Lanjut Pembiayaan Insinerator
12. Verifikasi e-Monev Bappenas lingkup DJPK Triwulan I Tahun 2026
13. Rapat Rutin LAUTRA
14. *Ocean Monitoring System (OMS) Technical Guideline Workshop*
15. Pembahasan Tindak Lanjut Usulan Rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) DJPK Tahun 2027.

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pemantauan NKPA seluruh unit kerja di lingkup DJPK.

IK 8. Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai akan disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

Tabel 13. Kerangka Maturitas SPIP

LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Formula Perhitungan:

- a. Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP.
- b. Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas:
 1. Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I
 2. Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian IK Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai) Triwulan II Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan							
IK – 8	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian

3,896	-	-	-	-	-	3,6	3,9	-
-------	---	---	---	---	---	-----	-----	---

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 pencapaian IKU ini melibatkan seluruh ASN dan Non ASN lingkup DJPK dengan didukung oleh sarana dan prasana yang memadai dalam kegiatan SPIP.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh ASN dan Non ASN di lingkup DJPK dengan sarana yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kebutuhan kegiatan SPIP.
- F. Kegiatan Pendukung
 1. Monitoring atas penyusunan MR dan Pemantauannya Pasca Penyesuaian Carry Over Anggaran Lautra Tahun 2026
 2. Monitoring atas penyusunan MR dan Pemantauannya Pasca Penyesuaian efisiensi anggaran pergaraman
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026
 1. Menyusun laporan SPIP pada periode berikutnya
 2. Melakukan pemantauan MR dan kegiatan

IK 9. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi

untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Probis KKP terdiri atas:

1. Probis Level 0;
2. Probis Level 1;
3. Probis Level 2; dan
4. Probis Level 3.

Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3.

Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 0 dan Level 1.

Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
2. Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran Probis Level 2. Target tercapai apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
3. Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi.

5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.
6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Variabel 1 (V1) =

Probis Level 2 seluruhnya telah selesai disusun (15%), tidak selesai (0%).

Data dukung:

Hasil verifikasi dan persetujuan atas usulan Probis Level 2 dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 2 (V2) =

$$\frac{\text{jumlah Probis Level 3 yang selesai disusun dan telah di verifikasi}}{\text{jumlah Probis Level 3 yang harus disusun}} \times 40 \%$$

Data dukung:

Dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 3 (V3) =

Identifikasi Judul SOP seluruhnya telah selesai disusun (10%), tidak selesai (0%)

Data dukung :

Matriks Identifikasi Judul SOP berdasarkan dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 4 (V4) =

$$\frac{\text{jumlah SOP yang selesai disusun dan telah diverifikasi}}{\text{jumlah SOP yang harus disusun}} \times 25\%$$

Data dukung:

Dokumen SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai dengan Matriks Identifikasi Judul SOP.

Variabel 5 (V5) =

- a. **Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3 (5%);**
- b. **hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau**
- c. **tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%).**

Data dukung :

- a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan
- b. Dokumen Probis Level 3 yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi.

Variabel 6 (V6) =

- a. **Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (5%);**
- b. **hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau c. tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%).**

Data Dukung :

- a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan
- b. Dokumen SOP yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dan telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi

$$\text{Nilai Total} = V1+V2+V3+V4+V5+V6$$

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian IK Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%) Triwulan II Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
IK – 9	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)

Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
2025	-	-	-	-	-	66	69	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa aspek yakni :

1. Telah disusun matriks uraian fungsi seluruh Eselon II yang kemudian akan di cascading ke Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
2. Melakukan koordinasi yang efektif dan efisien untuk percepatan antar Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan antar Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

F. Kegiatan Pendukung

1. Analisis kebutuhan Standar Operasional Prosedur teknis bidang produksi garam.

2. Analisis kebutuhan Standar Operasional Prosedur teknis bidang pengelolaan kelautan.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Menyusun matriks cascading uraian fungsi Direktorat Sumber Daya Kelautan kepada Unit Pelaksana Teknis Bidang Produksi Garam.

IK 10. Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Formula Perhitungan :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi bobot nilai 25
 - b. Kompetensi bobot nilai 40
 - c. Kinerja bobot nilai 30; dan
 - d. Disiplin bobot nilai 5.
2. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:
 - a. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
 - Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/

- SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

NILAI	NAMA KUALIFIKASI	NILAI KUALIFIKASI
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

- b. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
1. ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 2. ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 3. ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh Pegawai (Bobot)					
				S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

c. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari :

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

d. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja ASN, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- e. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat..

No	Nama Hukuman Disiplin	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Ringan</i>	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Sedang</i>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Berat</i>	1

3. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	0-60

4. Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
 - Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang

- dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
- c. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
5. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
- PNS; dan
 - PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 16. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)
Triwulan II Tahun 2026**

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 10		Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
2025	83,59	-	108,55%	77	103,19%	81	84	99,51%

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Data capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Triwulan II Semester I Tahun 2026 pada domain <https://ipasn.sdmao.id/> yaitu sebesar 83,59 (kategori tinggi) terdiri atas:

- Kualifikasi sejumlah 23,08
- Kompetensi sejumlah 29,75
- Kinerja sejumlah 25,77

4. Disiplin sejumlah 5.

Berdasarkan hal tersebut maka capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 berhasil melampaui target sebesar 77.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan II tahun 2026 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 maka, capaian pada triwulan II 2026 lebih rendah. Hasil ini disebabkan oleh lebih rendahnya aspek penilaian kompetensi dan kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 masih belum mencapai target diharapkan capaian di akhir tahun indikator kinerja ini nantinya bisa mencapai target.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa aspek yakni :
1. Keaktifan seluruh pegawai di lingkup Ditjen PK dalam hal peningkatan kompetensi.
 2. Sumber data yang digunakan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga validitas data lebih terjamin. serta keaktifan seluruh pegawai lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dalam mengikuti peningkatan kompetensi dan juga melakukan peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN individu pegawai melalui riwayat sertifikasi di menu “kursus” dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- F. Kegiatan Pendukung
1. Layanan Usulan Kenaikan Pangkat pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan untuk periode Triwulan II Tahun 2026.
 2. Asistensi pengisian capaian kinerja/SKP pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada periode Triwulan II Tahun 2026.

3. Pengusulan peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada periode Triwulan II Tahun 2026.
 4. Pengusulan Pencantuman Gelar pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada periode Triwulan II Tahun 2026.
 5. Pelaksanaan layanan usulan mutasi/alih tugas pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada periode Triwulan II Tahun 2026.
 6. Pelaksanaan penilaian 360 derajat Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada aplikasi Portal KKP.
 7. Monitoring Presensi Kehadiran Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Triwulan II pada Aplikasi SIKEPO.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026
1. Layanan Usulan Kenaikan Pangkat pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan untuk periode Triwulan III Tahun 2026.
 2. Asistensi pengisian capaian kinerja/SKP pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan untuk periode Triwulan III Tahun 2026.

IK 11. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional.

Data diambil dari pengisian kuesioner secara sampling, yang diisi oleh petugas Pengelola Data kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah teregister pada tahun sebelumnya.

Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu :

1. Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30 %.
2. Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%.
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Formula Perhitungan:

$$\text{Persentase TKPD: } (30. X_1) + (40. X_2) + (30. X_3)$$

Adapun kriteria penilaiannya adalah :

Nilai TKPD 0 % - 25,9 % (tidak patuh)

Nilai TKPD 26 % - 50,9 % (cukup patuh)

Nilai TKPD 51 % - 75,9 % (patuh)

Nilai TKPD 76 % - 100 % (sangat patuh)

Rumus Variabel Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1):

$$\sum KUSUKA = \left(\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid, Terdaftar, Termutakhirkan}}{\text{Total Target}} \right) \times 100$$

Rumus Variabel Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X₂):

$$X = \left(\frac{\text{Realisasi jumlah sampling yang divalidasi}}{\text{Jumlah data sampling produksi garam yang diinput}} \right)$$

Rumus Variabel Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X₃)

Nilai per eselon 1 =

$$\left(\frac{\text{jumlah rencana aksi yang diselesaikan}}{\text{total kegiatan berdasarkan rencana aksi}} \right) \times 100$$

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 17. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)
Triwulan II Tahun 2026**

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 11		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
91%	-	-	-	-	-	91%	91%	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan indikator ini didukung oleh terlaksananya kegiatan dalam mendukung capaian indikator kinerja sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian indikator kinerja ini adalah pemanfaatan sistem Portal data KKP untuk pendataan dan validasi data KUSUKA petambak garam, IGT DJPK, dan produksi garam nasional.
- F. Kegiatan Pendukung
 - 1. Persiapan pendataan produksi garam tahun 2026
 - 2. Validasi Nasional Produksi Garam Tahun 2025 pada tanggal 18 – 21 Mei 2026
 - 3. Kontrol kualitas IGT DJPK
 - 4. Validasi KUSUKA
 - 5. Penguatan Penyelenggaraan Safeguard LAUTRA
 - 6. Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) DJPK
 - 7. Penyusunan IGT Bantuan Pemerintah LAUTRA 2025
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026
 - 1. Monitoring Triwulan III Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
 - 2. Kontrol Kualitas IGT DJPK
 - 3. Penguatan kapasitas Safeguard LAUTRA
 - 4. Penguatan kapasitas Gender LAUTRA
 - 5. Pelaksanaan Pendataan Usaha Garam 2026

6. Penyusunan IGT Sekeretariat 2025.

IK 12. Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 ttg Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023.

Formula Perhitungan :

Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 77.

Capaian hasil dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Capaian} = \frac{N1 + N2 + N\ldots}{\text{Total N}}$$

Keterangan :

N1 : Nilai Proposal 1

N2 : Nilai Proposal 2

N~ : Nilai Proposal 3 dst

Total N : Jumlah Proposal yang diajukan

Nilai capaian : capaian hasil

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian IK Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai) Triwulan II Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
IK – 12	Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)

Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
77,55	-	-	-	-	-	78	81	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: partisipatif unit kerja untuk menciptakan terobosan/inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta tersedianya sumberdaya yang menunjang inovasi pelayanan publik.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPK adalah dengan melibatkan seluruh pegawai unit kerja dan mendapatkan dukungan Pimpinan Unit Kerja serta dilakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam penciptaan inovasi pelayanan publik.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPK, adalah

1. Pendampingan penyusunan proposal penilaian inovasi pelayanan publik

2. Monitoring pelaksanaan kegiatan inovasi yang diusulkan.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

1. Pendampingan penyusunan proposal penilaian inovasi pelayanan publik
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan inovasi yang diusulkan.

IK 13. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2026, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Formula Perhitungan :

$$\text{Persentase Penyelesaian Progsun Permen} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Kepmen (Unit Organisas Es1

Keterangan :

A = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

B = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026

Tabel 19. Capaian IK Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%) Triwulan II Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
--------	---

IK – 13		Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
2025	-	-	-	-	-	100%	100%	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, terdapat 6 (enam) rancangan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkup DJPK yang masuk dalam program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan tahun 2026, terdiri atas:

- a. 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
- b. 5 (lima) Rancangan Keputusan Menteri Kelautan,

dimana sampai dengan semester I tahun 2026 terdapat 1 (satu) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah selesai yakni Keputusan Menteri Kelautan tentang Penetapan Kawasan Konservasi. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Kelautan memperhatikan nota dinas Kepala Biro Hukum nomor 2667/SJ.4/TU.210/VII/2026 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2026 tanggal 13 Juli 2026, hingga Triwulan II tanggal 30 Juni 2026 terdapat 1 (satu) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah selesai 100% (seratus persen) namun capaian semester I tahun 2026 hanya mencapai 16,67%, yakni rancangan Keputusan Menteri Kelautan tentang Penetapan Kawasan Konservasi, dengan realisasi progres peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi (kumulatif terbuka) yaitu:

- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2026 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Ujungnegoro Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2026 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2026 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
 - e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2026 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
 - f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2026 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja 2025 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- Keberhasilan**
- 1. Melakukan pembahasan rancangan peraturan menteri dan keputusan menteri secara intensif.

2. Melakukan koordinasi dengan K/L terkait, pemangku kepentingan dalam percepatan penyusunan rancangan peraturan menteri dan keputusan menteri.

Kendala

1. Efisiensi anggaran dan pengurangan SDM sehingga capaian kinerja kurang maksimal;
2. Penyusunan peraturan perundang-undangan tidak hanya substansi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan saja namun pada level Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pada level peraturan perundang-undangan yang terkait substansi K/L lain yang beririsan dengan tugas dan kewenangannya dengan KKP.

Solusi

1. Agar dilakukan penambahan anggaran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan penambahan jumlah SDM karena beban kerja yang sangat besar dibandingkan dengan ketersediaan anggaran yang minim dan sumber daya manusia yang sedikit jumlahnya.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran telah dilakukan dalam kegiatan penyusunan/pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kelautan. Kegiatan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yakni ASN DJPK, ASN lintas unit eselon I KKP, lintas sektor K/L yang terkait substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun, dan/atau pakar. Pertemuan/pembahasan rancangan produk dilakukan melalui daring (*virtual zoom meeting*) atau luring.

F. Kegiatan Pendukung

1. Menghadiri Rapat Panitia Antar kementerian / Antar Nonkementerian (PAK) Penyusunan Perpres tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah bertempat di Ayana Midplaza Jakarta Pusat tanggal 1 April 2026.
2. Menghadiri Rapat Verifikasi Akhir Data Dukung Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 Variabel I dan Variabel II bertempat di Wisma Gracilaria Jakarta Timur tanggal 1 April 2026.
3. Menghadiri Rapat Verifikasi Akhir Data Dukung Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2026 Variabel III dan Varibel IV bertempat di Wisma Gracilaria Jakarta Timur tanggal 2 April 2026.

4. Menghadiri Rapat Pembahasan Teknis Rancangan Perpres Jakstranas Terkait Penanganan Sampah Laut bertempat di Pullman Thamrin Hotel Jakarta Pusat tanggal 2 April 2026.
5. Menghadiri Rapat Pembahasan Permohonan Penetapan Pembina Sektor Komoditas Pergaraman dan Komoditas Perikanan bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta Pusat tanggal 2 April 2026
6. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan bertempat di Aryaduta Hotel Menteng Jakarta Pusat tanggal 13 s.d. 14 April 2026.
7. Menghadiri Rapat dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bertempat di Badan Legislasi DPR, Gedung Nusantara I Jakarta Selatan tanggal 15 April 2026.
8. Menghadiri Rapat Pembahasan Legalisasi Panduan Nasional Tata Kelola Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi bertempat di Aryaduta Hotel Menteng Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2026.
9. Menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Bantuan Program LAUTRA Komponen 2 Kabupaten Manggarai Barat, Sabu Raijua, Kabupaten Manggarai dan Gorontalo bertempat di Mercure Cikini Hotel Jakarta Pusat tanggal 5-6 Mei 2026.
10. Rapat Finalisasi Draf Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Forum Komunikasi Konservasi bertempat di Aryaduta Menteng Hotel Jakarta Pusat tanggal 5 Mei 2026.
11. Rapat Pembahasan Penetapan Kawasan Konservasi Daerah di Perairan di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Novotel Cikini Hotel Jakarta Pusat tanggal 13 Mei 2026.
12. Menghadiri Rapat Pembahasan Lanjutan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Nasional Koordinasi Implementasi bertempat di Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 18 Mei s.d. 20 Mei 2026.
13. Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Hasil dan Keputusan terkait Isu Komoditas Pergaraman pada Rakor Menko Bidang Pangan tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, Neraca Komoditas Tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025.

14. Menghadiri Rapat Workshop Nasional Kelompok Kerja Status dan Kondisi Karang dan Lamun Indonesia bertempat di Erian Hotel Jakarta Pusat tanggal 20 Mei 2026.
15. Uji Petik Implementasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan bertempat di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo tanggal 17 Juni s.d. 19 Juni 2026.
16. Rapat Pembahasan dan Simulasi Pengusulan Kawasan Konservasi Laut Lepas dalam Kerangka Persetujuan BBNJ pilar ABMT-MPA bertempat di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta Pusat tanggal 17 Juni s.d. 18 Juni 2026.
17. Menghadiri Kegiatan Simposium Data dan Informasi Large – Scale Marine Protected Area (LSMPA) Sumatera bertempat di Kabupaten Badung Provinsi Bali tanggal 21 Juni s.d. 24 Juni 2026.
18. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut Sehat Bebas Sampah bertempat di Hotel Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim Jakarta Pusat tanggal 24 Juni s.d. 25 Juni 2026.
19. Rapat Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan bertempat di Aston Priority Simatupang Jakarta Selatan tanggal 26 Juni s.d. 27 Juni 2026.
20. Rapat pembahasan Rencana Pembiayaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Kawasan Strategis Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao bertempat di Ashley Hotel Wahid Hasyim Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2026.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

1. Advokasi Hukum terkait Pendampingan Perkara Gugatan Perdata Nomor 278/Pdt.G/2025/PN Srg di Pengadilan Negeri Serang.
2. Rapat Pembahasan Pengembangan Bisnis dan Akses Pembiayaan Dana Ekonomi Produktif Berkelanjutan (DEPB).
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang SEBASA.
4. Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Pedoman Pelaksanaan *Program Oceans For Prosperity* – LAUTRA Komponen 2 dan Perluasan Peluang Ekonomi di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
5. Rapat Pembahasan Strategi Optimalisasi PNBPN dari Perdagangan Karbon Sektor Kelautan (Blue Carbon).

6. Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
7. Rapat Persiapan Penetapan Lokasi (Penlok) tahap II Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur.

IK 14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi maka perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang

berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a) penciptaan arsip (25%),
 - b) penggunaan arsip (25%),
 - c) pemeliharaan arsip (25%),
 - d) penyusutan arsip (25%)
- 2) Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a) sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b) prasarana dan sarana (50%)

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian IK Pengawasan Kearsipan Internal DJPK Triwulan II Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	
IK – 14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)	
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026	Renstra DJPK 2025-2029

2025	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
97,38	-	-	-	-	-	81	84	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan

1. Seluruh Naskah Dinas yang diciptakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri KP tentang Tata Naskah Dinas
2. Unit Kearsipan dan Unit Pengelola Kearsipan telah melaksanakan Pengelolaan Arsip Dinamis (Penciptaan, Penggunaan, Pemeliharaan dan Penyusutan)
3. Tersedianya Arsiparis pada Unit Kearsipan dan Unit Pengelola

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melibatkan seluruh unit kerja lingkup Setditjen PK serta terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh ASN serta memanfaatkan sarana dan prasarana baik itu secara online ataupun hybrid (online sekaligus offline).

F. Kegiatan Pendukung

1. Mengikuti Koordinasi dan Sosialisasi Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) 2026 yang diselenggarakan oleh ANRI.
2. Mengikuti Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI.

3. Pembahasan pelaksanaan pengumpulan berkas-berkas yang menjadi objek pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PK.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

1. Verifikasi dan Klarifikasi Instrumen unit kerasipan.
2. Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2026.

IK 15. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang

diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%) Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan							
IK – 15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan II 2026	Kenaikan terhadap capaian TW I 2026	% Capaian Tw II	Target Triwulan II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
100%	99,99%	-24%	102,70%	75%	120%	77%	80%	120%

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2026 adalah 99,99% yang berarti capaian tersebut berhasil melampaui target Triwulan II 75%. Capaian tersebut diperoleh dari nilai rata-rata persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP seluruh satker lingkup DJPK (5 Satker).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2025
Jika capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 maka, capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 hal ini disebabkan oleh, aspek nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 jika dibandingkan dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, telah berhasil melampaui target Renstra dengan persentase capaian sebesar 120%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Pada Triwulan II tahun 2026 telah terdapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pengelola aplikasi di masing-masing Satker yang telah

mengumumkan RUP sesuai dengan pagu pengadaan pada aplikasi SIRUP, sehingga dapat memperoleh nilai diatas target.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target IKU ini, efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan operator SIRUP dari masing-masing Satker lingkup DJPK.

F. Kegiatan Pendukung

Update aplikasi SIRUP paket pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PK Triwulan II Tahun 2026.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Update aplikasi SIRUP paket pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PK Triwulan III Tahun 2026 secara rutin dengan mencermati revisi DIPA/RKAKL yang sudah dilakukan.

IK 16. Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- a. Mengumumkan informasi publik
- b. Menyediakan informasi publik
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Kelembagaan
- e. Digitalisasi.

Formula perhitungan

- 1) Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).
- 2) SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.
- 3) Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.
- 4) Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80% dan presentasi sebanyak 20%.
- 5) Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

Tabel 22. Nilai dan Predikat atas Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

No	Predikat	Interval Sektor
1	Informatif	90 – 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang Informatif	40 – 59,9

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian IK Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai) Triwulan I Tahun 2026

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IK – 16		Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
	2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target
	100	-	-	-	-	-	92	95

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2024
Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian ini didukung unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, koordinasi dengan seluruh Penanggung Jawab Kegiatan lingkup DJPK.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu melibatkan petugas pelayanan informasi publik lingkup Ditjen PK sesuai dengan SK Tim PPID Ditjen PK Tahun 2026.
- F. Kegiatan Pendukung
 - 1. Updating website KKP dan website PPID
 - 2. Pelayanan permohonan data dan informasi lingkup DJPK
 - 3. Penerbitan SK PPID terkait Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Lingkup DJPK
 - 4. Workshop Pengisian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP
 - 5. Pengisian Kuesioner & Unggah Data Dukung (SAQ) pada Aplikasi Pelikan.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026
 - 1. Verifikasi Kuesioner & Data Dukung (SAQ)
 - 2. Penilaian Kuesioner (Validasi hasil penilaian dan Sidang Pleno, Masa Sanggah, Pengumuman hasil penilaian SAQ).

IK 17. Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)

Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh KKP dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja KKP. Pelaksanaan

kerja sama di lingkungan KKP berpedoman pada e.Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- 1) Mengutamakan kepentingan nasional;
- 2) Kejelasan tujuan dan hasil;
- 3) Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- 4) Saling menghargai dan menguntungkan;
- 5) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- 6) Tidak menimbulkan ketergantungan;
- 7) Terencana dan berkelanjutan;
- 8) Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- 9) Berbasis indikator, kinerja, efektif dan efisien; dan
- 10) Bersifat kelembagaan.

Pelaksanaan kerjasama bidang pengelolaan kelautan meliputi kerjasama nasional dan internasional. Kerja Sama nasional meliputi kerja sama yang dilakukan DJPK dengan Kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah. Kerja sama internasional meliputi kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara asing, organisasi internasional pemerintah, organisasi internasional non pemerintah, dan organisasi/lembaga asing. Untuk mencapai sasaran dan target program Pengelolaan Kelautan, DJPK memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak di dalam negeri seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun kelompok masyarakat. Penguatan dukungan dalam berbagai bentuk kerja sama dari luar negeri tidak luput dari sasaran potensial mitra kerja sama dalam akselerasi pencapaian program Pengelolaan Kelautan. Kerja sama luar negeri dapat dijalin melalui kerja sama bilateral, regional, multinasional, lembaga internasional di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Lembaga Donor, Non Government Organization (NGO) asing, maupun Organisasi Masyarakat Asing (Ormas Asing).

Untuk menentukan capaian pelaksanaan kerja sama bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

1. Persentase dokumen kerja sama yang disepakati (X1), Bobot Nilai 40%.
2. Persentase pemenuhan kertas posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun (X2), Bobot Nilai 30%.
3. Persentase tindak lanjut kerja sama nasional yang telah disepakati (X3), Bobot Nilai 30%.

Persentase pelaksanaan kerjasama bidang pengelolaan kelautan:

$$X1 (40\%) + X2 (30\%) + X3 (30\%) = 100\%$$

- Variabel persentase dokumen kerja sama yang disepakati (X1) dengan rumus: $(a)/b \times 100\%$
Keterangan: a = Dokumen kerja sama yang ditandatangani; b = Dokumen kerja sama yang diusulkan
- Variabel persentase pemenuhan kertas posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun (X2) dengan rumus: $(a)/b \times 100\%$
Keterangan: a = Jumlah dokumen kertas posisi yang disusun; b = Jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional
- Variabel persentase tindak lanjut kerja sama nasional yang telah disepakati (X3) dengan rumus: $(a)/b \times 100\%$

Keterangan: a = Capaian output setiap kegiatan (renaksi) b = Target output setiap kegiatan (renaksi)

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 24. Capaian IK Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%) Triwulan I Tahun 2026

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan							
IK – 17	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian Tw I	Target Triwulan I	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target	% Capaian
100	-	-	-	-	-	100%	-	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang memiliki secara tahunan sehingga pada Triwulan II Tahun 2026 tidak memiliki target dan capaian namun, hingga Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan penandatanganan 16 (enam belas) dokumen kerja sama program pengelolaan kelautan, yaitu :

- 1) Perjanjian Kerja sama (PKS) antara Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dan Yayasan BIONESIA pada 30 Januari 2026;

- 2) PKS antara DJPK dan Yayasan Samudera Indonesia Timur (YASIT) pada 5 Februari 2026;
- 3) PKS antara Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup dan DJPK pada 11 Februari 2026;
- 4) PKS antara DJPK dan Yayasan KEHATI pada 5 Maret 2026;
- 5) PKS antara DJPK dan Yayasan EcoNusa pada 6 Maret 2026;
- 6) PKS antara LPK Pekanbaru dengan PT Mifa Bersaudara dan KOMPAK Pusong Diving Club dan KOMPAK Aroen Muebanja pada 24 April 2026;
- 7) PKS antara LPK Pekanbaru dan Yayasan Fifan Laut Nusantara pada 24 April 2026;
- 8) PKS antara Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dan Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (JSI) pada 4 Mei 2026;
- 9) PKS antara LPK Pekanbaru dan Yayasan Pelestarian Flora dan Fauna Bangka Belitung (ALOBİ) pada 29 Mei 2026;
- 10) Perjanjian Kemitraan antara BPK Denpasar dan Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram pada 3 Juni 2026;
- 11) PKS antara DJPK dan Yayasan Konservasi Indonesia (KI) pada 7 Juni 2026;
- 12) PKS antara Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dan PT Jaya Real Property, Tbk (Unit BXSea Oceanarium) pada 13 Juni 2026;
- 13) PKS antara DJPK dan Yayasan Institut Sumber Daya Dunia (WRI) pada 25 Juni 2026;
- 14) PKS antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan DJPK pada 25 Juni 2026;
- 15) PKS antara BPK Pontianak dan PT Jenggala Bentala Indonesia pada 1 Juli 2026;
- 16) Kesepakatan Bersama antara DJPK dan PT GARAM pada 2 Juli 2026.

Selain itu, hingga Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan penyusunan bahan kertas posisi Indonesia untuk partisipasi Delegasi DJPK pada pertemuan kerja sama internasional sebagai berikut:

- 1) *World Economic Forum 2026* di Davos, Swiss, 18-23 Januari 2026;
- 2) *the Sulu-Sulawesi Seascapes (SSS) Sub-Group's 2nd Dialogue di Manila, Filipina*, 10-11 Maret 2026;
- 3) *Third Session of Preparatory Commission (PrepCom III) Agreement of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction*

(BBNJ Agreement) di New York, Amerika Serikat, 23 Maret - 2 April 2026.

- 4) CTI-CFF *Bismarck Solomon-Seas Seascape (BSS) Sub-Group Side Event at the Melanesian Oceans Summit (MOS)* di Port Moresby, Papua Nugini, 14-15 Mei 2026.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Tahun 2024
Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2025 karena, frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Tidak ada target dan indikator Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati pada Rencana Strategis DJPK 2025-2029.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan

Beberapa faktor keberhasilan dari indikator kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :

1. Dukungan dan partisipasi aktif dari unit kerja teknis Ditjen PK sebagai pemrakarsa kerja sama program PK dalam proses penyusunan naskah kerja sama.
2. Proses penandatanganan dokumen kerja sama program PK dilakukan secara *desk to desk*.

Kendala

1. Komunikasi dan koordinasi di level internal masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyelenggaraan seremonial penandatanganan naskah kerja sama.
2. Proses reviu dan pengesahan naskah final dokumen PKS yang telah dibahas para pihak membutuhkan waktu lebih lama.

Solusi

1. Diperlukan komunikasi aktif antara Para Pihak melalui pertemuan koordinasi agar memiliki kesepahaman yang sama penyelenggaraan seremonial penandatanganan naskah kerja sama.
2. Meningkatkan koordinasi di level internal untuk mempercepat proses finalisasi naskah kerja sama yang telah dibahas para pihak.

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPK.

F. Kegiatan Pendukung

1. *Third Session of Preparatory Commission (PrepCom III) Agreement of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement)* di New York, Amerika Serikat, 23 Maret - 2 April 2026;
2. *CTI-CFF Bismarck Solomon-Seas Seascape (BSS) Sub-Group Side Event at the Melanesian Oceans Summit (MOS)* di Port Moresby, Papua Nugini, 14-15 Mei 2026

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Koordinasi pembahasan penyusunan rancangan naskah kerja sama program pengelolaan kelautan dan pelaksanaan penandatangannya.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Setditjen PK tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPK pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPK. Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PK Tahun 2026 adalah Rp79.945.803.000. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PK mencapai Rp28.320.159.342 dengan persentase sebesar 35,42%.

Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen PK, yang ditandai dengan tercapainya target beberapa indikator pada Tahun 2026 dan beberapa indikator yang sudah berproses untuk pencapaian targetnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PK dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PK terdapat 17 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PK. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026 sebesar **112,74 (Istimewa)**.

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 indikator yang memiliki target berdasarkan target tersebut 2 inikator kinerja berhasil tercapai yakni Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%) dengan capaian 85,44 serta Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%) dengan capaian 99,48.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPK (%)	Triwulanan	81	81	85,44	105,48
	2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan	Tahunan	-	<0,5	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
		BPK-RI atas LK DJPK (%)					
	3.	Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai)	Tahunan	-	76	-	-
	4.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPK (%)	Tahunan	-	81	-	-
	5.	Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK (Nilai)	Tahunan	-	70	-	-
	6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPK (Nilai)	Semesteran	-	89	-	-
	7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK (Nilai)	Tahunan	-	81,5	-	-
	8.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai)	Tahunan	-	3,5	-	-
	9.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP DJPK (%)	Tahunan	-	65	-	-
	10.	Indeks Profesionalitas ASN DJPK (Indeks)	Semesteran	-	80	-	-
	11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPK (%)	Tahunan	-	91	-	-
	12.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik DJPK (Nilai)	Tahunan	-	77	-	-
	13.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan	Semesteran	-	100	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Triwulan	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2026	
						Capaian	% (Kinerjaku)
		Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)					
	14 .	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPK (Nilai)	Tahunan	-	80	-	-
	15 .	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPK (%)	Triwulanan	74	76	99,48	120
	16 .	Nilai keterbukaan informasi publik DJPK (Nilai)	Tahunan	-	91	-	-
	17 .	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	Tahunan	-	100	-	-

Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PK Tahun 2026 adalah Rp79.945.803.000. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PK mencapai Rp28.320.159.342 atau 35,42%.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PK, direkomendasikan perbaikan antara lain:

1. Penguatan komunikasi dan koordinasi berjenjang dengan keterlibatan aktif pimpinan dalam memberikan arahan, penyamaan persepsi, dan memastikan informasi terkait pembangunan integritas tersampaikan secara konsisten kepada seluruh pegawai.
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui pengendalian deviasi Halaman III DIPA, monitoring penyerapan secara berkala, percepatan penyelesaian revisi *carryover* LAUTRA, serta penyusunan rencana aksi percepatan pelaksanaan anggaran untuk mendukung peningkatan nilai IKPA.
3. Penguatan pengendalian penyelesaian output di tengah keterbatasan SDM dan kompleksitas proses lintas unit/K/L melalui penajaman

prioritas, penetapan PIC dan *backup PIC*, dokumentasi *handover*, *tracking* berbasis *milestone*, serta eskalasi terhadap pekerjaan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja.

4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Pada triwulan I Tahun 2026 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja Setditjen PK Triwulan I Tahun 2026

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Melakukan percepatan penyelesaian sisa tindak lanjut hasil pengawasan APIP melalui penguatan monitoring berkala, penetapan target waktu penyelesaian, serta peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait guna memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan akuntabel.	Telah dilakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi APIP melalui penguatan monitoring berkala, penetapan target waktu penyelesaian, serta peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait guna memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan akuntabel. Link Data Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1MyItF9BwURUVcU4QBPNXHJ7O7j8lwCVJ
2.	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar Tim Kerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melalui pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala, penguatan komunikasi internal, serta penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan guna mendukung keterpaduan pelaksanaan program dan	Telah dilakukan koordinasi dan kolaborasi antar Tim Kerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melalui pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala guna memperkuat komunikasi internal serta penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan guna mendukung keterpaduan pelaksanaan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	pencapaian target kinerja organisasi.	program dan pencapaian target kinerja organisasi. Link Data Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1MyItF9BwURUVcU4QBPNXHJ7O7j8lwCVJ
3.	Melakukan evaluasi berkala terhadap progres pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai dasar pengambilan langkah percepatan maupun penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.	Telah dilakukan evaluasi berkala terhadap progres pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai dasar pengambilan langkah percepatan maupun penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya. Link Data Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1MyItF9BwURUVcU4QBPNXHJ7O7j8lwCVJ

An artistic illustration of an underwater scene. The background is a gradient of teal and blue, with a bright yellow sun or moon in the upper center. A large purple jellyfish with long, flowing tentacles is on the left. Several orange and white clownfish are swimming, including one near the text. The bottom of the image is filled with various types of coral in shades of orange, red, and purple. Other small fish are scattered throughout the scene.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditiengk@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Miftahul Huda**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

++
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK)	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PK (%)	81
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PK (%)	<0,5
		3.	Nilai pembangunan integritas Ditjen PK (Nilai)	77
		4.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Program Prioritas/Strategis lingkup Ditjen PK (%)	82
		5.	Nilai penilaian mandiri SAKIP Ditjen PK (Nilai)	72
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PK	89,5
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen PK (Nilai)	81,75
		8.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP Ditjen PK (Nilai)	3,6
		9.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP Ditjen PK (%)	66
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PK (Indeks)	81
		11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PK (%)	91
		12.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PK (Nilai)	78
		13.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan (%)	100
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen PK (Nilai)	81
		15.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PK (%)	77
		16.	Nilai keterbukaan informasi publik Ditjen PK (Nilai)	92
		17.	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	66.013.084.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026		66.013.084.000

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda